

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Rumusan Masalah	13
3. Definisi Konseptual	14
4. Kerangka Teori	15
5. Metode	20
5.1. Pendekatan Masalah	20
5.2. Bahan Hukum	21
5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ...	22
5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	22
6. Tujuan Penulisan	23
7. Pertanggungjawaban Sistematika	23
 BAB II PENGATURAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TERHADAP NEGARA PANTAI DAN NEGARA LAIN DI ZONA EKONO- MI EKSKLUSIF	26
2.1. Hak, Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai di Zona Ekonomi Eksklusif	26

2.2. Hak dan Kewajiban Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif	36
2.3. Status Hukum Zona Ekonomi Eksklusif ...	39
 BAB III KESINKRONAN UNDANG-UNDANG ZONA EKONOMI EKS- KLUSIF INDONESIA TERHADAP KONVENSI HUKUM LA- UT 1982	 49
3.1. Dua Ketentuan Nasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif	49
3.2. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif	52
3.3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang Berhadapan dengan Negara Lain	56
3.4. Hak Berdaulat, Hak lain, Yurisdiksi dan Kewajiban Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	60
3.5. Kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif In- donesia	68
3.5.1. Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	68
3.5.2. Pembuatan dan Penggunaan Pulau Buat- an, Instalasi dan Bangunan Lainnya ..	74
3.5.3. Penelitian Ilmiah Kelautan	77

3.5.4. Tindakan Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Dumping	81
3.6. Ganti Rugi	84
3.6.1. Ganti Rugi Akibat Tindakan yang Bertentangan dengan Ketentuan tentang Pulau-Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya	84
3.6.2. Ganti Rugi Akibat Penelitian Ilmiah Kelautan	87
3.6.3. Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut	90
3.7. Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	94
BAB IV PENUTUP	105
DAFTAR PUSTAKA	107